

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi dengan Judul:

Peran *Non-Governmental Organizations* dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Turki

Ivan Yudha Firmansyah Putra

20140510012

Yang disetujui,



Dr. Nur Azizah, M.Si.

Dosen Pembimbing

PERAN *NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS* DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI TURKI

Ivan Yudha Firmansyah Putra

20140510012

Hubungan Internasional

ABSTRACT

Although Turkey has signed and ratified various international treaties on women's rights, significant setbacks in socio-economic and political access for women still persist. This research seeks to explore the phenomenon of non-governmental organization, notably the resurgence of women movements and women associations in contemporary Turkey. This present study aims to explain the different role and determined agenda taken up by Turkish women NGOs working in increasing women's participation in public sphere, especially in economic and political sector in order to improve women's life and attain gender equality.

Key words: *NGO, women organization, Turkey, feminism, women's rights, gender equality*

Republik Turki memiliki keunikan lokasi yaitu wilayah negaranya terletak di dua benua yang berbeda, benua Asia dan sebagian kecil berada di benua Eropa bagian Tenggara. Kekaisaran Utsmani sebagai pendahulunya pernah menguasai wilayah-wilayah disekitarnya termasuk negara-negara Balkan, Timur Tengah,

Afrika bagian utara bahkan beberapa wilayah bagian Eropa Tengah pada masa jayanya. Dengan begitu Turki mempunyai banyak warisan sejarah unik yang memiliki kompleksitas dampak pada kehidupan sosial, budaya dan politik masyarakatnya hingga sekarang. Republik Turki yang baru berdiri pada 29 Oktober 1923 setelah runtuhnya

Kekaisaran Utsmani dan merupakan negara yang mengimplementasikan demokrasi sekuler sebagai landasan negaranya. Di republik yang baru ini, Turki mengadopsi perubahan-perubahan terhadap konstitusi dan undang-undang yang ada. Mereka melakukan perubahan mulai dari perihal pemisahan antara negara dengan agama hingga hak-hak kaum perempuan. Kesetaraan gender di Turki memang memiliki sejarah yang panjang dan telah ada semenjak reformasi Republik Turki. Reformasi yang dicapai pada 1923 sebenarnya menandai awal sejarah kesetaraan gender di Turki sebagai bagian dari adanya sebuah proses modernisasi dan transformasi budaya, dari sebelumnya negara dengan latar belakang agama dan tradisional menjadi barat dan modern. Modernisasi Turki tidak dapat lepas dari karakter masyarakatnya yang cenderung dipengaruhi budaya timur dalam memandang peranan di keluarga, sehingga dalam beberapa konteks peran perempuan sebagai istri ataupun ibu sangat bertentangan dengan nilai-nilai barat dalam memandang hak-hak dan kebebasan pada keluarga modern.

Menurut Nukhet Kardam, hak perempuan masih menjadi sebuah permasalahan utama dalam konflik perdebatan antara ‘Barat’ dengan ‘Islam’, dan juga antara pandangan ‘universal’ dan ‘kultural’ terhadap hak asasi manusia pada umumnya¹.

Meskipun Turki telah mengambil langkah menuju kesetaraan gender seperti dengan meratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), partisipasi kaum perempuan pada area seperti partisipasi politik, kesehatan reproduksi, jangkauan pendidikan dan akses ketenagakerjaan masih membutuhkan perbaikan yang signifikan² walaupun Turki merupakan negara yang memiliki peradaban maju dan perekonomian negara yang sudah termasuk mapan. Tingkat kesenjangan gender perempuan di dalam masyarakat Turki tergolong masih tinggi

¹ Kardam, Nukhet. *“Social Transformation in Women’s Human Rights (With a Focus on Turkey)”*. International Studies Association (ISA) Human Rights Joint Conference Istanbul, Turkey 2014. Hal.2

² Hurriyet Daily News. *“Women’s participation in politics ‘still low’ in Turkey”*. www.hurriyetaidailynews.com. [Diakses 29 Maret 2017]

dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, hal ini disebabkan oleh budaya dominasi laki-laki dan struktur patriarkhi pada kalangan masyarakatnya sehingga tidak memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya.³ Jika dilihat menurut angka keterwakilan perempuan dalam bidang politik, ketimpangan gender pada parlemen Turki menyebabkan Turki menempati posisi rendah menurut *Gender Gap Index*.

Turki terkenal dengan kondisi masyarakatnya yang cenderung patriarkhial, sistem patriarkhi masih terdapat di Turki walaupun telah mengalami proses modernisasi. Struktur patriarkhi merupakan salah satu aspek penting mengapa perempuan tidak dapat memperoleh akses yang mudah untuk masuk ke ruang publik sebagai representasi bagi kaumnya. Terlepas dari latar belakang kesetaraan gender yang asimetris pada status perempuan di Turki, organisasi perempuan sejak awal

dasawarsa 1990 telah banyak memberikan kontribusi dalam menekan undang-undang, kebijakan dan peraturan dengan perspektif gender guna meningkatkan kapasitas perempuan dalam partisipasi kaumnya pada partisipasi di bidang sosial, ekonomi dan politik di negara tersebut. Melalui upaya mereka, kesadaran masyarakat telah meningkat dan masyarakat mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang isu-isu disparitas gender yang ada di Turki.

Turki memiliki sejarah panjang dalam upaya mencapai kesetaraan gender, dimulai semenjak era kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk tahun 1923 dimana Turki mengalami masa modernisasi. Atatürk sangat memperhatikan setiap aspek dari kehidupan perempuan, termasuk dari cara mereka berpakaian sebagaimana dengan peran dan kewajiban mereka dalam masyarakat. Menurutny perempuan harus bisa berperan aktif dalam ranah publik sebagai seorang individu yang berpendidikan, karena ia percaya bahwa perempuan merupakan “*pillars of society*” sehingga perempuan harus menjadi individu yang berbudi

³ The Executive Committee for NGO Forum on CEDAW Turkey. “*Shadow NGO Report on Turkey’s Sixth Periodic Report to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women*”. 46th Session of CEDAW, Juli 2010. Hal.9-10

luhur untuk dapat memberikan contoh bagi generasi baru⁴. Pada November 2001, Turki mengambil sebuah langkah besar dengan diratifikasinya amandemen baru oleh *Turkish Grand National Assembly* (TGNA) dalam Hukum Sipil terkait hak-hak perempuan sebagai pemegang peranan penting dalam keluarga yang sebelumnya hanya menempati posisi sebagai subordinat⁵. Semenjak Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdoğan berkuasa dimulai dari tahun 2003, secara perlahan sistem pemerintahan mengalami perubahan ke arah yang lebih moderat dan demokratis.

Menurut Sirin Tekeli, usaha yang perlu diperjuangkan ialah mengenai bagaimana membuat perubahan pada pola pemikiran dan nilai-nilai budaya sehingga sistem sosial kemasyarakatan di Turki akhirnya dapat mengakui bahwa

⁴ Arat, Necla. "Women's Studies in Turkey", *Women's Studies Quarterly*, Vol. 24, No.1/2, Beijing and Beyond: Toward the Twenty-First Century of Women (Spring-Summer, 1996), Hal.401

⁵ Arat, Yesim. "Women's Rights and Islam in Turkish Politics: The Civil Code Amendment", *Middle East Journal*, Vol/64, No.2 (Spring 2010), Hal.235

kaum perempuan sebagai individu memiliki martabat yang sama dengan individu lainnya, yang dalam konteks ini adalah laki-laki⁶. Pernyataan tersebut didukung oleh anthropologis Jenny B. White yang menegaskan bahwa hak perempuan (*Women's Rights*) sebagai sebuah konsep tidak benar-benar memiliki resonansi bagi orang-orang di Turki, menyebabkan perempuan di Turki selalu dilihat bukan sebagai individu⁷. Individu-individu yang aktif dan bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan merupakan sebuah indikator penting bagi pembangunan negara. Karena hal tersebut menunjukkan adanya fenomena Perempuan dan Pembangunan (WAD), dimana terdapat asumsi bahwa perempuan selalu memiliki posisi penting pada tatanan masyarakat dan pekerjaan yang dilakukannya pada ranah domestik dan publik ataupun komunitas sangat mendasar untuk bisa mempertahankan kelompok mereka serta

⁶ Tekeli, Sirin. "The Turkish Women's Movement: A Brief History of Success", *Quaderns de la Mediterrania*, 14, Tahun 2010. Hal.123

⁷ Bohn, Lauren. "In Turkey, women's issues gain visibility", <http://www.america.aljazeera.com/> [Diakses 30 Mei 2017]

posisi perempuan akan menjadi lebih baik selama dan ketika struktur internasional yang ada tetap pada kondisi yang adil⁸ atau setara.

Republik Turki resmi berdiri pada tahun 1923 dibawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Ia memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk membawa modernisasi ke Turki yaitu dengan memilih jalan untuk fokus melihat ke Barat serta berusaha membawa masuk nilai-nilainya daripada melihat ke Timur⁹. Republik Turki sejak awal didirikan memang merupakan sebuah negara sekuler, hal ini telah tercantum di dalam konstitusi negara. Dengan begitu Turki memiliki peluang besar untuk akhirnya dapat mengimplementasikan kebijakan yang memiliki dasar nilai-nilai yang berasal dari Barat. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Mustafa Kemal Atatürk ialah perhatiannya terhadap proses emansipasi wanita di Turki. Pada fase ini dapat dikategorikan sebagai

gelombang feminisme yang pertama awal dasawarsa 1900-an ketika sudah terdapat organisasi perempuan namun masih dalam skala yang kecil dan masih mendapat pengaruh Kemalisme dalam memandang kesetaraan gender. Selama masa awal 1990, Turki mengalami peningkatan angka pada jumlah studi yang membahas tentang gerakan wanita, namun aktivitas mereka masih sebatas mengenai permasalahan sosial, anti-imperialisme dan eksploitasi daripada isu-isu penting menyangkut permasalahan yang dihadapi oleh perempuan¹⁰.

Meski demikian, rezim yang berkuasa tidak memberikan izin pendirian organisasi perempuan yang independen. Gerakan feminisme yang muncul pada periode ini juga tidak mendapat sambutan baik oleh pemerintah.

Pergerakan identitas organisasi perempuan dipengaruhi oleh perkembangan pandangan ideologi dan politik pada aspek kehidupan di

⁸ Mosse, Julia Cleves. (1996). *"Gender dan Pembangunan"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.208

⁹ Ab Rahman, Asyraf Hj, et al. *"Modernization of Turkey under Kamal Atatürk"*. Asian Social Science Vol.11 No.4, January 2015. Hal. 202

¹⁰ Mercil, Ipek & Osman Senemoglu. *"The Historical Grounds of the Turkish Women's Movement"*, Human and Social Studies, Vol.3, Issue 1 (March 2013). Hal.16

masyarakat Turki tergantung pada fokus utama gerakan ataupun interaksi dengan aktor lain, sehingga mereka memiliki ciri-ciri tersendiri. Secara tidak resmi, gerakan perempuan di Turki berdasarkan ideologi yang dibawa dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu *Kemalist*, *Islamist*, *Leftist* dan *Kurdish*¹¹. *Kemalist*, Organisasi perempuan Kemalis cenderung menentang adanya indoktrinasi bahwa perempuan harus mengenakan kerudung. Mereka lebih fokus pada upaya modernisasi sebagai bentuk dorongan terhadap proses sekularisasi masyarakat Turki. Selain itu organisasi ini mempunyai prioritas seperti meningkatkan kualitas tingkat pendidikan untuk melawan buta huruf dan jumlah perempuan yang bersekolah serta mempromosikan partisipasi perempuan di arena pasar dan tenaga kerja. *Islamist*, organisasi perempuan Islamis lebih memosisikan sebagai kelompok yang ingin mendorong perempuan dalam menjalankan perannya

sebagai ibu dan istri dalam kehidupan berkeluarga. *Leftist*, organisasi perempuan sayap kiri berjuang dalam menuntut pengakuan atas persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan yang menyangkut partisipasi politik. Mereka menuntut agar perempuan diberikan akses serta kesempatan yang sama untuk ambil bagian dalam proses penentuan kebijakan pada lembaga dan institusi politik. *Kurdish*, organisasi perempuan ini lebih mengarah pada upaya penghapusan diskriminasi etnis dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang politik yang menyebabkan perempuan Kurdi sering menghadapi kesulitan. Organisasi jenis ini juga menyuarakan isu-isu spesifik seperti kekerasan domestik dan perampasan hak.

Terlepas dari perbedaan prioritas organisasi mereka masing-masing, sebagian besar dari organisasi dan gerakan perempuan mempunyai permasalahan yang sama yaitu terkait pelanggaran hak asasi perempuan. Mereka membentuk kerjasama melalui agenda kesetaraan gender seperti isu peningkatan tingkat partisipasi perempuan pada tiap jenjang pendidikan,

¹¹ World Bank. *Bridging the Gender Gap in Turkey: A Milestone Towards Faster Socio-Economic Develoement and Poverty Reduction*. Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region. 2003. Hal. 171

menolak penurunan tenaga kerja perempuan dalam lingkungan kerja, mendukung penempatan perempuan sebagai representasi dalam proses pengambilan keputusan pada institusi politik, menuntut adanya kuota bagi perempuan serta menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan¹². Gerakan perempuan membentuk jaringan organisasi sebagai media atau *platform* yang menghubungkan mereka dengan berbagai isu-isu gender terkini melalui kampanye yang bertujuan sebagai upaya mobilisasi organisasi dan kelompok perempuan.

Dalam perkembangannya terdapat organisasi perempuan yang berupaya untuk mendorong tingkat partisipasi perempuan, KAGİDER, KA.DER dan juga KADEM berusaha mendorong partisipasi perempuan untuk berperan dalam agenda perumusan kebijakan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan negara.

Keterlibatan *NGO* perempuan pada pemberian dukungan dan pelatihan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik akan menjadi kontribusi positif bagi transformasi, perkembangan dan kemajuan Turki yang nantinya dapat mencapai sistem pemerintahan yang berkeadilan gender sehingga manfaatnya dapat dinikmati baik oleh laki-laki atau khususnya oleh kaum perempuan itu sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya, kaum perempuan maupun *NGOs* Perempuan sendiri masih sama-sama menghadapi kendala yang telah mengakar kuat pada struktur sosial yang tidak adil di Turki.

KAGİDER, KA.DER dan KADEM yang dapat dikategorikan sebagai gerakan perempuan di Turki memiliki peranan sentral agar perempuan mampu menjadi partisipasi dalam pembangunan negara, khususnya melalui bidang sosio-ekonomi dan politik. Kemajuan dan perkembangan para perempuan Turki dalam bidang ekonomi dan politik menjadi salah satu alasan mengapa perempuan layak untuk

¹² Diner, Cagla & Tokas, Sule. "Waves of Feminism in Turkey: Kemalist, Islamist and Kurdish Women's Movements in an Era of Globalization", *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 12(1), March 2010. Hal. 41-57

mendapatkan hak merepresentasikan kaumnya karena terciptanya keadilan, efisiensi dan kepentingan umum membutuhkan paling tidak representasi yang setara antara perempuan dan juga laki-laki, salah satunya pada proses pembuatan kebijakan. Sebagai wadah bagi kaum perempuan, banyak dari *NGO* perempuan mulai melakukan upaya eksplorasi melalui berbagai kegiatan dan pelatihan mengenai bagaimana cara agar perempuan dapat mencapai kelayakan untuk merepresentasikan dirinya. Kepercayaan bahwa perempuan membutuhkan wakil perempuan bukan hanya untuk mewakili sebuah elektorat khusus, tetapi menjadi wakil yang mampu dan layak untuk mewakili perempuan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap aspek kehidupan perempuan seperti pola dan gaya hidup serta status sosio-ekonomi sehingga perempuan di Turki dapat menyuarakan hak-hak perempuan, memperoleh kesejahteraan ekonomi serta dapat menempatkan perempuan dalam berbagai agenda pembuatan kebijakan.

Hingga sekarang ini, banyak hukum dan perundang-undangan di

Turki untuk kesetaraan gender yang dapat didefinisikan sebagai *gender-neutral*. Beberapa dasawarsa terakhir, Turki mendapatkan pengaruh rezim internasional untuk merevisi segera semua hukum dan perundangan yang sudah ada agar dapat terintegrasi dengan perspektif kesetaraan gender¹³. Dan semenjak periode awal tahun 2000-an, Turki melakukan reformasi hukum dengan menghapuskan ketentuan-ketentuan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan.

Hukum dan perundang-undangan terkait hak-hak perempuan dan kesetaraan gender telah disesuaikan dengan standar hukum internasional yang berlaku seperti Konvensi CEDAW dan *Acquis* Uni Eropa. Usaha pemerintah dalam menangani isu perempuan sebenarnya dapat dilihat dari disertakannya isu gender dalam agenda pembangunan Turki *Fifth Five Year Development Plan* tahun 1985 hingga 1990. Salah satu pencapaian pemerintah

¹³ Alçuner, Selma. "Gender and Development in Turkey", *Turkish Policy Quarterly*, Vol.11 No.4. Hal72 (Winter 2013).
<https://www.turkishpolicy.com/files/ArticlePDF/gender-and-development-in-turkey-winter-2013-en.pdf> Diakses 15 Maret 2018

terkait isu perempuan melalui agenda tersebut ialah berdirinya *Directorate General on Status and Problems of Women* (DGSPW) pada tahun 1990¹⁴. Kemudian di awal dasawarsa berikutnya Turki melakukan revisi Kode Sipil yang sebelumnya telah disusun dengan mengadaptasi dari Kode Sipil Swiss pada masa awal terbentuknya Republik Turki. Pemerintah melakukan revisi pada Kode Sipil yang telah ada karena terdapat tuntutan dari Komisi Uni Eropa setelah Turki resmi menjadi kandidat calon anggota komunitas regional tersebut sehingga Turki harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa termasuk meningkatkan angka kesetaraan gender. Kebijakan amandemen yang dilakukan Turki terhadap hukum-hukum di negaranya juga sedikit demi sedikit diselaraskan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Turki.

Hubungan kerjasama yang erat antara *NGO* perempuan lokal dan

internasional mampu mendorong pemerintah Turki untuk melakukan realokasi sumber daya yang ada dalam upayanya merumuskan kembali kebijakan berkesetaraan gender. *NGO* perempuan, instansi pemerintah dan lembaga internasional menjadi aktor utama dalam proses ini. Langkah awal yang dilakukan pemerintah Turki dalam proses penentuan kebijakan terkait kesetaraan gender adalah membentuk DGSPW sebagai instrumen utama. Upaya pemerintah tentang kebijakan kesetaraan gender ini dapat dicirikan dengan bentuk pengalihan perspektif dari yang sebelumnya mempunyai sensitivitas umum menjadi ke arah yang lebih inklusif pada gender, atau dapat dikatakan sebagai upaya pengarusutamaan gender. Agar implementasi kebijakan pengarusutamaan gender pemerintah dapat berjalan efektif, pemerintah membentuk *Advisory Board on the Status of Women* pada tahun 2004 dibawah naungan DGSPW sebagai Dewan Penasehat dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi antara Kementerian,

¹⁴ Kaya, Eylem. (2009). "An Overview of Turkish Women's Status in Turkey", *Toplum ve Demokrasi* 2(5), Ocak-Nisan. Hal.214

Lembaga Akademik dan *NGO* perempuan.

Pengarusutamaan gender pada seluruh kebijakan, perencanaan dan program yang menjadi target DGSPW menjadi agenda pemerintah Turki hingga saat ini. Meski pada kenyataannya, sistem birokrasi negara masih sangat erat dengan dominasi mentalitas laki-laki. Sebagai upaya pengarusutamaan gender, beberapa badan dan institusi pemerintahan dijadikan sebagai target agar dapat menerima adanya kesetaraan di dalamnya. Namun, meski menunjukkan adanya peningkatan dalam program dan kapasitas kelembagaan pemerintah, terdapat kekurangan yang masih berkelanjutan pada aspek-aspek yang tidak tersentuh oleh agenda pengarusutamaan gender pemerintah Turki. Proyek pembangunan pemerintah yang kurang melihat aspek kesetaraan gender tanpa disadari justru menciptakan ketidaksetaraan yang akan menjadi hambatan jika tidak segera dilakukan revisi.

Sebuah amandemen terkait UU Partai Politik dan UU Pemilu telah menjadi pembahasan selama beberapa

tahun terakhir, menuntut setidaknya 1/3 kuota perempuan pada pemilihan umum dengan ketentuan khusus untuk dapat memastikan penempatan mereka pada posisi yang dapat dipilih. Proposal amandemen ini menjadi agenda utama *NGO* perempuan di Turki dan telah direkomendasikan dalam Laporan Komisi Uni Eropa pada tahun 2005 dan 2006.

Posisi Turki dalam konteks kemajuan demokrasi pada era tersebut tergolong bagus karena memiliki perkembangan yang sangat progresif dalam perihal pemberian hak untuk memilih bagi perempuan. Namun dalam faktanya diketahui hanya sejumlah perempuan saja yang mampu menjadi anggota parlemen, seperti pada tahun 1935 jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen di Turki hanya mencapai angka delapan belas orang. Meski sekarang ini jumlah perempuan Turki yang memiliki ketertarikan dan minat pada dunia politik semakin banyak dan meningkat setiap tahunnya, tetap saja proporsi anggota perempuan di parlemen Turki rendah dibandingkan saat era kepemimpinan presiden Atatürk.

Sebagai contoh pada hasil pemilihan anggota parlemen tahun 1999 menunjukkan bahwa hanya terdapat 22 dari total 555 orang yang merupakan representatif perempuan atau hanya 4% saja. Kemudian pada pemilihan umum tahun 2007, persentase jumlah perempuan dalam parlemen meningkat ganda menjadi 9,5% dan merupakan rasio tertinggi dalam sejarah demokrasi di Turki pada masa itu¹⁵.

KAGİDER, KA.DER dan KADEM dalam perannya sebagai *The Implementer* dapat diketahui melalui upaya ketiga *NGO* perempuan dalam proses menjalankan proyek ataupun program yang berasal dari ketiga *NGO* itu sendiri maupun proyek dan program yang sebenarnya milik pemerintah dan lembaga atau instansi tertentu baik dari lingkup nasional maupun internasional yang sifatnya mampu mendorong dan menggerakkan kaum perempuan agar menjadi lebih berdaya dengan adanya agenda kegiatan dan fasilitas seperti pelatihan, konseling hingga bantuan

pendanaan yang diberikan kepada perempuan yang menjadi sasaran dalam proyek tersebut. Kemudian KAGİDER, KA.DER dan KADEM dapat menjalankan proyek ataupun program yang bukan merupakan agenda dari organisasinya melainkan milik pemerintah atau lembaga lain karena mereka telah menerima *support* anggaran dana sebagai biaya operasional dari setiap aktivitas yang dilakukan.

Peranan sebagai *The Role of Catalysts*. KAGİDER, KA.DER dan KADEM sebagai *NGO* perempuan yang terlibat aktif pada upaya mendorong partisipasi perempuan di Turki melakukan agenda kegiatannya dengan memberikan sebuah dorongan yang dapat menginspirasi, selain itu mereka juga memberikan fasilitas kepada perempuan guna meningkatkan kapasitasnya. Perempuan yang dilibatkan tidak hanya dari kalangan menengah keatas, perempuan dari golongan akar-rumput juga dapat terlibat. Ini karena pada peranan katalis, *NGO* menempatkan posisinya sebagai pembela masyarakat, khususnya kaum perempuan sebagai bentuk upaya

¹⁵ Tabak, Husrev, et al. (2017). *Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Hal.3

advokasi terhadap perempuan itu sendiri. KAGİDER, KA.DER dan KADEM memberikan stimulus, mendorong dan memotivasi perempuan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan dimana perempuan-perempuan Turki yang berpotensi terus diasah sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam dirinya. Disamping itu berbagai pelatihan, seminar serta diskusi dan dialog antar perempuan juga dilaksanakan guna menambah wawasan para perempuan sehingga lebih siap dalam menghadapi permasalahan di sektor publik yang biasanya hanya merupakan bagian untuk kaum laki-laki.

Selain itu, kampanye (*campaign*) juga menjadi salah satu agenda mereka dalam mempengaruhi opini publik dan masyarakat Turki baik perempuan maupun laki-laki. Tujuannya agar masyarakat menjadi sadar akan hak-hak perempuan sehingga mereka, khususnya kaum perempuan, turut berpartisipasi dalam agenda pemberdayaan yang dapat memajukan dan memberikan manfaat bagi diri mereka. Pada peranan katalis ini, *NGO* perempuan juga mempunyai kegiatan yang berbentuk lobi (*lobbying*)

sebagai salah satu cara mempengaruhi proses perumusan kebijakan-kebijakan, terlebih kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Upaya aktif ini tidak lain bertujuan agar agenda pemerintah yang terkait isu-isu perempuan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan sehingga *NGO* dapat membentuk jaringan kuat dari organisasinya untuk melindungi hak-hak perempuan.

Sedangkan melalui peranannya *The Role of Partner*, KAGİDER, KA.DER dan KADEM menjalin hubungan dengan beberapa mitra atau *partner* sebagai bentuk kerjasama dalam upaya memerangi kesenjangan gender yang menjadi hambatan pada struktur tatanan sosial Turki. Kerjasama juga dapat diutamakan pada persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pemberdayaan bagi perempuan Turki. Kerjasama yang digagas dalam bentuk *joint activities* dapat dilakukan dengan beberapa aktor penting seperti institusi maupun lembaga pemerintahan, lembaga donor dan juga tidak menutup

kemungkinan dilakukan dengan *NGO* lain yang memiliki tujuan sama.

KAGİDER, KA.DER dan KADEM melakukan usaha yang mengangkat fenomena kesenjangan gender dan upaya pemberdayaan kaum perempuan dengan cara mencari dukungan dari mitra-mitra penting yang dapat memberikan kontribusi positif melalui jalur *partnership* atau kerjasama dengan mereka. Peluang terbentuknya jaringan kerjasama oleh *NGO* perempuan ini tidak menutup kemungkinan hanya pada level lokal atau yang sesama berasal dari Turki saja tetapi juga pada level regional dan internasional yang melibatkan pihak-pihak eksternal yang berada diluar Turki.

Penulis melihat bahwa peran KAGİDER, KA.DER dan KADEM sebagai *NGO* memiliki kecenderungan selalu mengarah pada bentuk upaya pemberdayaan melalui proyek atau program tertentu. Jika menurut Gunawan Sumodiningrat¹⁶, peran mereka termasuk pada kecenderungan sekunder yang

menekankan pada proses pemberian stimulasi, mendorong atau memotivasi individu atau kelompok tersebut agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk dapat menentukan apa yang menjadi pilihan serta tujuan.

KAGİDER, KA.DER dan KADEM menjadi organisasi perempuan yang memiliki posisi sebagai kelompok yang melakukan proses pemberdayaan dengan cara yang sudah disusun secara terstruktur dan sistematis bagi perempuan lain baik individu ataupun berbentuk kelompok dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan potensi kemampuannya melalui upaya pemberdayaan dengan memberikan dorongan, motivasi dan fasilitas seperti kegiatan pelatihan, advokasi, kampanye dan menjalin kerjasama dengan pihak lain sebagai usaha pengembangan kemampuan dan kapasitas guna meningkatkan partisipasi perempuan di Turki.

Jika dilakukan analisa pada bentuk kegiatan yang dijelaskan diatas, maka sesuai dengan model pendekatan peran *NGO* milik David Lewis, KAGİDER dalam perannya sebagai *The*

¹⁶ Rakhman, Anita. "*Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat*". www.anita-rakhman.dosen.stkipsiliwangi.ac.id. Diakses 6 April 2017

Implementer dapat dibuktikan pada proyek atau program antara lain *Water Drop Project*, *The Women's Fund*, IFTF, *Women Entrepreneurs Associations Portal* dan *KAGİDER Compass Project*.

Sesuai *The Role of Catalyst*, dapat dibuktikan melalui proyek dan program antara lain *Water Drop Project*, KAGİMER, *The Women's Fund*, *Girls in Kars Move Ahead*, dan *Women Leaders Future Project*. Agenda yang dilakukan tidak hanya memberikan dorongan motivasi dan pelatihan saja, namun KAGİDER juga melakukan upaya advokasi melalui proyek seperti FEM, *Women's Way to Europe*, *EU Women's Communication Project* dan *Women20*.

Terakhir, jika dilihat berdasarkan *The Role of Partner*, KAGİDER menjalin kerjasama dengan aktor lain melalui proyek *Bridge from Women to Women*, *WE Mentor Project*, *European Network of Mentors for Women Entrepreneurs*, *Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training* dan *Young Ideas for Empowering Women*.

Sementara analisa yang telah dilakukan peneliti dalam melihat peranan KA.DER pada proyek dan program yang dilaksanakan menghasilkan pembuktian bahwa KA.DER terbukti menjalankan perannya sebagai *NGO* dengan melalui model pendekatan peran *NGO* milik David Lewis, yaitu *The Implementer Role*, *The Role of Catalysts* dan *The Role of Partner*.

Sebagai *NGO* katalis dalam proyek *KA.DER Siyaset Okullari* (KA.DER School of Politics) yang juga merupakan wujud dari *The Implementer Role*. Sementara pada peran pemberdayaan yang lain yaitu melalui program *KA.DER Yurttaslarin Guclendirilmesi Projesi* (KA.DER Empowerment of Women Citizen Project) atau Proyek Pemberdayaan KA.DER terhadap Warga Negara Perempuan dan *Project for Strengthening Women and Activists as Voters and Active Citizens*.

KA.DER juga melakukan upaya kampanye melalui poster yang disebarakan lewat media massa baik online maupun cetak. Melalui poster-

poster tersebut KA.DER berusaha menyampaikan pesan dan menarik perhatian kaum perempuan untuk menjadi lebih peka, sadar dan peduli akan pentingnya partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Kemudian dalam peran mitra atau *The Role of Partner*, KA.DER telah berhasil menjalin kerjasama dengan Uni Eropa, SIDA (*Swedish International Development Cooperation Agency*), UNDEF (*United Nations Democracy Fund*), *European Instrument for Democracy and Human Rights*, Konsulat Belanda untuk Turki serta Pemerintah Turki sendiri melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Turki dalam menjalankan program-program pemberdayaan perempuan.

Yang terakhir pada hasil dari analisa pada setiap kegiatan dan agenda KADEM, penulis menemukan pembuktian bahwa KADEM menjalankan perannya sebagai *NGO* perempuan melalui dua model pendekatan peran *NGO* milik David Lewis yaitu *The Implementer Role*, *The Role of Catalysts* dan *The Role of Partner*. Dilihat melalui pendekatan *The*

Role of Catalysts, KADEM berperan dalam upaya meningkatkan partisipasi, jumlah perwakilan dan visibilitas perempuan dalam bidang politik melalui agenda lokakarya bertajuk *Project EU-TR Civil Network for Women in Politics* dan *Yerel Yonetimler Kadın Aday Egitimi* atau *Training for Female Candidates in Local Administrations* serta *Women's Leadership Training*, *Training in the Legal Rights of Women* dan *Women in Innovation Entrepreneurship Project*.

Selain dorongan melalui pelatihan, pendidikan dan motivasi, KADEM juga menjalankan upaya advokasi melalui *Project EU-TR Civil Network for Women in Politics* dan disaat berlangsungnya W20 Summit. Usaha kampanye bahkan dilakukan KADEM seperti pemanfaatan media massa untuk kampanye "*We Are Supporting Women Candidates*".

Peran *The Role of Partner* KADEM dapat dibuktikan melalui kerjasama pada agenda *Project EU-TR Civil Network for Women in Politics* yang pada operasionalisasinya menggandeng dua mitra yaitu yaitu

Council for Justice, Equality and Peace (COJEP) dari Perancis dan *Forum of European Muslim Youth and Student Organizations* (FEMYSO) dari Belgia. Pada agenda *Training in the Legal Rights of Women* KADEM juga menjalin kerjasama dengan Universitas Marmara dan Lembaga Riset Ilmiah dan Teknologi Turki TÜBİTAK. Agenda W20 juga menunjukkan bahwa KADEM bermitra dan sebagai implementer dari program dibawah G20 bersama KAGİDER dan TİKAD dalam agenda Women20 dibawah payung G20 yang diluncurkan untuk pertama kali di Turki.

KAGİDER, KA.DER dan KADEM menjadi salah satu contoh *NGO* yang melakukan upaya eksplorasi melalui berbagai aktivitas dan agenda mengenai bagaimana cara agar perempuan dapat mencapai kelayakan untuk berpartisipasi secara aktif pada sektor publik dan merepresentasikan dirinya. Peran ketiga *NGO* tersebut dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap aspek kehidupan perempuan seperti pola dan gaya hidup serta status sosio-ekonomi

sehingga perempuan di Turki dapat menyuarkan hak-hak perempuan, memperoleh kesejahteraan ekonomi serta dapat menempatkan perempuan dalam berbagai agenda pembuatan kebijakan.

